

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Bagian Hukum Setda selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dengan :

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, antara lain :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 13 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keugian Negara;

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo ;
- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019 disusun agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :"

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1. Pendapatan LRA

3.1.2. Belanja LRA

3.2. Neraca

3.2.1. Aset

3.2.2. Kewajiban

3.2.3. Ekuitas

3.3. Laporan Operasional

3.3.1. Pendapatan LO

3.3.2. Beban LO

3.3.3. Surplus / Defisit

3.4. Laporan Perubahan ekuitas

3.4.1. Perubahan ekuitas

Bab. IV Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab. V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

2.1.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Selama periode berjalan, Bagian Hukum Setda telah mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) dari DPA awal.

Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Naik/ (Turun)
Pendapatan			
<i>Pendapatan Asli daerah</i>	-	-	-
<i>Pendapatan Transfer</i>	-	-	-
<i>Lain-Lain Pendaptn. Yang Sah</i>	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			-
<i>Belanja Operasi</i>	707,700,000.00	593,768,464.00	(113,931,536.00)
<i>Belanja Modal</i>	-	-	-
<i>Belanja Tak Terduga</i>	-	-	-
<i>Belanja Transfer</i>	-	-	-
Jumlah Belanja	707,700,000.00	603,618,464.00	(113,931,536.00)
Surplus /Defisit	(707,700,000.00)	(603,618,464.00)	113,931,536.00

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi TA 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2021	Lebih/(Kurang) dari Anggaran	%
Pendapatan dan Belanja				
<i>Pendapatan</i>	-	-	-	-
<i>Belanja</i>	707,700,000.00	603,618,464.00	(104,081,536.00)	79,98
Surplus/(Defisit)	(707,700,000.00)	(603,618,464.00)	104,081,536.00	79,98
Pembiayaan			-	
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
SILPA	(707,700,000.00)	(603,618,464.00)	104,081,536.00	79,98

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa :

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan, sehingga tidak terdapat realisasinya
2. Belanja Tahun Anggaran 2021 dapat terealisasi sebesar Rp.603.618.464,00 atau 79.83 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 707.700.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 104.081.536,00
3. Surplus/(defisit) anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (707.700.000,00) yang diperoleh dari realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja.
4. Pembiayaan Netto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 tidak ada realisasinya.
5. SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mencapai sebesar Rp. Rp. (707.700.000,00).

2.1.2. Realisasi TA 2020 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2021

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada tabel berikut :

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/Turun	%
Pendapatan dan Belanja				
<i>Pendapatan</i>	-	-	-	-
<i>Belanja</i>	603,618,464.00	766,310,572.00	(162,692,108.00)	(21.23)
Surplus/(Defisit)	(603,618,464.00)	(766,310,572.00)	162,692,108.00	(21.23)
Pembiayaan				
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
SILPA	(603,618,464.00)	(766,310,572.00)	162,692,108.00	(21.23)

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 tidak ada
2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan sebesar -21.23% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020.
- 3 Tidak ada Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021.
4. SILPA Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar - 21.23% dibandingkan SILPA Tahun Anggaran 2020.

2.1.3. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi.

1. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bagian hukum adalah karena terbatasnya anggaran dan personil dari bagian hukum, dimana dalam struktur organisasi bagian hukum satu kasubag hanya mempunyai satu staf, dimana dalam menangani pelayanan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, dimana dalam proses penyusunan tidak semua berjalan lancar, karena ada juga kendala penyusunan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini mengingat bahwa bagian hukum sebagai fungsi legal drafting harus meneliti konten dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk agar peraturan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sudah sesuai dengan undang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan .
2. Sumber daya manusia yang ada dibanding dengan jumlah pelayanan yang dilakukan sangat tidak seimbang dimana dengan personil sebanyak 8 orang harus melayani semua dinas dan lembaga yang ada di kabupaten wonosobo terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

**BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

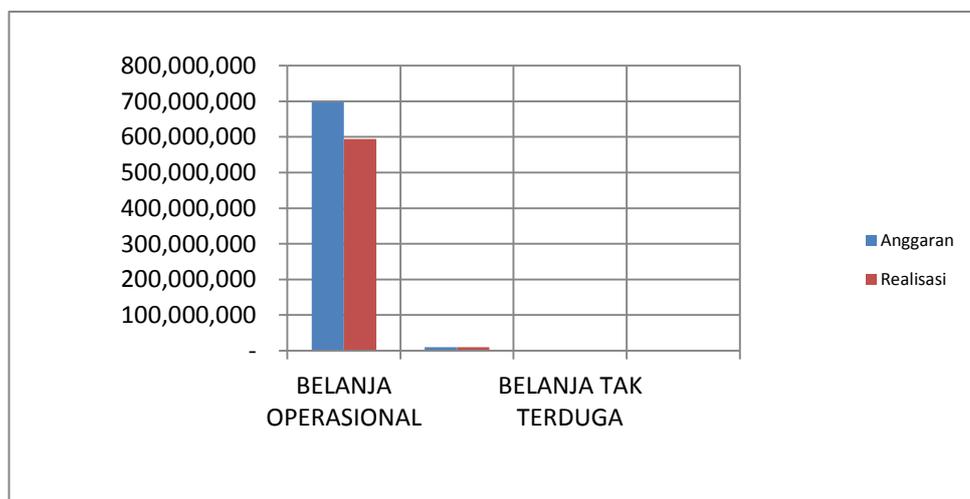
A. Pendapatan-LRA

Nihil

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Secara garis besar anggaran dan realisasi belanja Bagian Hukum Setda TA 2020 serta realisasi TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	+ -%
BELANJA OPERASIONAL	697,700,000.00	593,768,464.00	766,310,572.00	13.6
BELANJA MODAL	10,000,000.00	9,850,000.00	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TRANSFER	-	-	-	-
Jumlah	707,700,000.00	603,618,464.00	766,310,572.00	13.6

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp. 603,618,464.00 atau mencapai 83,89 % dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 707,700,000.00 kurang dari anggaran sebesar Rp. 104,081,536.00.

Bila dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 162.692.108,00 atau 10.29 %
Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Bagian Hukum Setda TA 2021.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2021 dapat direalisasi sebesar Rp 593.768.464,00 atau mencapai 85.10 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 697.700.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp. 103.931.536,00"

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 serta TA 2021 sebagai berikut :

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	+ \-%
<i>Belanja Pegawai</i>	Rp -	Rp -	Rp 18,250,000	-
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Rp 697,700,000	Rp 593,768,464	Rp 748,060,572	13.89
<i>Belanja hibah</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
<i>Belanja bantuan sosial</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp 697,700,000	Rp 593,768,464	Rp 766,310,572	13.56

Bila dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja Operasi TA 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp. 172.542.108,00 atau 11.64%.

Adapun rincian masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi TA. 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 0.00 atau 0.00 % dari anggaran sebesar Rp. 0.00 kurang dari anggaran sebesar Rp. 0.00.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	+ \-%
<i>Honor PNS</i>	-	-	199,050,000.00	(100.0)
<i>Honor Lembur</i>	-	-	21,546,000.00	(100.0)
Jumlah	-	-	220,596,000.00	(100.0)

Bila dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. (220.596.000.00) atau (100) %. Belanja pegawai ini digunakan antara lain untuk honor, gaji tenaga kontrak maupun gaji pegawai bukan PNS.

2. Belanja Barang

Belanja barang TA 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 593.768.464,00 atau mencapai 85.10 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 697.700.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 103.931.536,00.

Bila dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 154.292.108,00 atau 8.06 % Realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2021

Belanja Barang	Anggaran	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	+ \-%
<i>Belanja Bahan Pakai Habis</i>	226,500,250.00	207,230,100.00	42,231,875.00	390.70
<i>Belanja Jasa Kantor</i>	138,750,000.00	94,100,000.00	48,758,000.00	92.99
<i>Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi</i>	25,000,000.00	-	-	-
<i>Belanja Peralatan Kendaraan Bermotor</i>	30,522,750.00	30,519,304.00	34,513,067.00	(11.57)
<i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	-	-	80,518,500.00	(100.0)
<i>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</i>	-	-	-	-
<i>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>	-	-	-	-
<i>Belanja Makan dan Minum</i>	-	-	54,290,000.00	(100.00)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<i>Belanja Makan dan Minum dan Belanja Perjalanan Dinas</i>	276,927,000.00	261,919,060.00	285,403,130.00	(8.23)
JUMLAH	697,700,000.00	593,768,464.00	545,714,572.00	8.81

3. Belanja Hibah

Nihil

4. Belanja Bantuan Sosial

Nihil

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal TA 2021 dapat terealisasi sebesar Rp.9.850.000,00 atau mencapai 98 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp.150.000,00.

Adapun perbandingan Belanja Modal pada TA 2021 dan TA 2020 sebagaimana tabel berikut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	+ -%
<i>Belanja Tanah</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
<i>Belanja Peralatan dan Mesin</i>	Rp 10,000,000	Rp 9,850,000	Rp -	98.0
<i>Belanja Gedung dan Bangunan</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
<i>Belanja Jalan, Irigasi</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
<i>Belanja Aset Tetap Lainnya</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
<i>Belanja Aset Lainnya</i>	Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp 10,000,000	Rp 9,850,000	Rp -	-

a. Belanja Modal Tanah

Nihil

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp.9.850.000,00, atau mencapai sebesar 98.00 % dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 penurunan sebesar Rp. 0 00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp. 9.850.000,00 berasal dari realisasi Belanja Modal Komputer berupa pengadaan peralatan personal komputer.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Nihil

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Nihil
- e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
Nihil

3.2. NERACA

Neraca 2020 Per 31 Desember 2021 menunjukkan posisi Aset sebesar Rp. 211.368.828,00 , Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 223.018.828 , sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	TA 2021	TA 2020	+ -%
Aset	Rp 212,218,828	Rp 211,368,828	103,70
Kewajiban	Rp -	Rp -	-
Ekuitas	Rp 223,018,828	Rp 211,368,828	103,70
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	Rp 223,018,828	Rp 211,368,828	103,70

3.2.1 ASET

Aset Bagian Hukum Setda per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 498,000,00 dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut:

A. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 desember 2020 sebesar Rp. 498,000,00 terdiri atas:

1.	Kas dan setara kas	Rp.	-
2.	Investasi Jangka Pendek	Rp.	-
3.	Piutang Pendapatan	Rp.	-
4.	Penyisihan Piutang	Rp.	-
5.	Beban di Bayar di Muka	Rp.	-
6.	Persediaan	Rp.	498,000
	JUMLAH	Rp.	498,000
1.	Kas dan Setara Kas		
	Nihil		
2.	Investasi Jangka Pendek		
	Nihil		
3.	Piutang Pendapatan		
	Nihil		
4.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
	Nihil		

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5. Beban Di Bayar Di Muka

Nihil

6. Persediaan

Nilai Persediaan per 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.498.000,00 dan Rp..498.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.00 .

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo persediaan TA 2021 sebesar Rp. 498.000,00 berasal dari Persediaan Bahan Pakai Habis, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2021
ATK	
kertas HVS 70 gram	172,500.00
Stopmap Kertas	6,000.00
Snalhektek kertas	8,000.00
CETAK DAN PENGGANDAAN	
Stopmap lambang	75,000.00
kwitansi Dinas	172,000.00
Lembar Disposisi	12,000.00
Amplop Pemda	52,500.00
Jumlah	498,000.00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Nihil

C. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai Rp.253.462.158,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Bagian hukum dengan saldo akhir Tahun 2019 sebesar Rp 285.156.241,00 mengalami turun sebesar Rp. 143.740.709,00 atau 101,64 % dari tahun 2018. Adapun rincian asset tetap selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Aset Tetap

Aset Tetap	TA 2020	TA 2019	% +/-
<i>Tanah</i>	#REF!	#REF!	-
<i>Peralatan dan Mesin</i>	Rp 440,001,108	Rp 440,001,108	00,00
<i>Gedung dan Bangunan</i>	#REF!	#REF!	-
<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	#REF!	#REF!	-
<i>Aset Tetap Lainnya</i>	#REF!	Rp 36,673,000	#REF!
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	Rp (225,446,325)	Rp (225,446,325)	-
Jumlah	#REF!	#REF!	#REF!

Adapun penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai berikut :

a. Tanah

Nihil

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Bagian Hukum Setda per 2019 dan 2020 adalah sebesar Rp. 440.001.108,00 dan Rp.440.001.108,00 sama dengan tahun 2019.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir
	2019	D	K	D	K	2020
<i>Peralatan dan Mesin</i>	Rp 440,001,108	Rp 8,521,765	Rp 8,521,765	Rp 24,575,000	Rp 24,575,000	Rp 440,001,108

Penjelasan Mutasi :

1. Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 246.614.108,00 tidak ada mutasi selama Tahun 2020

2. Alat Kantor

Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 52.191.000,00 Tidak ada mutasi selama tahun 2020.

3. Alat Rumah Tangga

Nilai aset tetap berupa alat rumah tangga per 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 2.900.000,00 dan Rp. 4.093.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.193.000,00.

4. Komputer

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nilai aset tetap berupa alat komputer per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 93.409.543,00 dan Rp. 129.779.235,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 36.369.692,00 atau 18,29% dari Tahun 2019.

Dengan mutasi selama tahun 2020 sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir
	2019	D	K	D	K	2020
<i>Komputer</i>	Rp 129,779,235	Rp 93,409,543	Rp 93,409,543	Rp 93,409,543	93,409,543	Rp 93,409,543

Penjelasan mutasi :

a. Penambahan Aset

Mutasi debit sebesar Rp. 93.409,543.000,- berasal dari Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer TA 2020.

b. Pengurangan Aset

Koreksi Kredit sebesar Rp.93.409.543,00 merupakan reklas ke peralatan studio visual.

5. Alat Studio

Nilai aset berupa alat studio per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.521.765,00 merupakan reklas dan Belanja Modal Komputer Tahun 2020 berupa peralatan studio visual.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1	<i>#REF!</i>	246,614,108.00
2	<i>Alat kantor</i>	50,998,000.00
3	<i>Alat rumah tangga</i>	4,093,000.00
4	<i>Komputer</i>	129,774,235.00
5	<i>Alat Studio</i>	8,521,765.00
Jumlah		440,001,108.00

c. ***Gedung dan Bangunan***

Nihil

d. ***Jalan, Jaringan dan Irigasi***

Nihil

e. ***#REF!***

#REF!

f. #REF!

Nihil

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. (275.645.031.00) dan Rp. (225.446.325.00) mengalami penurunan sebesar Rp. (50.198.706.00) atau sebesar 33.57 % dari tahun 2019.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Mutasi transaksi terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi		Saldo Akhir
	2019	D	K	D	K	2020
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	(275,645,031.00)	-	#REF!	(58,503,431.00)	-	(225,446,325.00)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NO	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	<i>Peralatan dan Mesin</i>	440,001,108.00	#####	164,356,077.00
2	<i>Gedung dan Bangunan</i>	#REF!	#REF!	#REF!
3	<i>Jalan, Irigasi Bangunan</i>	#REF!	#REF!	#REF!
Akumulasi Penyusutan		#REF!	#REF!	#REF!

D. DANA CADANGAN

Nihil

E. ASET LAINNYA

Nilai aset lainnya Bagian Hukum Setda per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 145.750,00 berupa aset lain-lain. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, nilai aset lain-lain pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.821.875,00,00 mengalami penurunan penyusutan barang rusak berat tahun 2020.

3.2.2 Kewajiban

Nihil

3.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 201.672.827,00 dan Rp. (1.177.453.255,00) mengalami Kenaikan sebesar Rp. (975.780.428.00) atau sebesar 12,01% dari tahun 2019.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada Bagian Hukum Setda yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional.

3.3.1 Pendapatan-LO

Nihil

3.3.2. Beban.

Beban sesuai PSAP 12 adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.466.483.344,00 dan Rp. 1.621.672.161.00.

Mengalami penurunan sebesar Rp. 155.188.817.00 atau sebesar 9,57% dari tahun 2019.

Rincian Beban Tahun 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019
<i>Beban Pegawai</i>	220,596,000.00	319,439,000.00
<i>Beban Persediaan</i>	176,954,875.00	308,058,775.00
<i>Beban Jasa</i>	48,758,000.00	158,883,000.00
<i>Beban Pemeliharaan</i>	34,513,067.00	31,109,066.00
<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	285,403,130.00	588,793,072.00
<i>Beban Bunga</i>		#REF!
<i>Beban Subsidi</i>		#REF!
<i>Beban Hibah</i>		#REF!
<i>Beban Bantuan Sosial</i>		#REF!
<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	47,969,102.00	60,200,431.00
<i>Beban Transfer</i>	#REF!	#REF!
<i>Beban Lain-lain</i>	-	#REF!

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	#REF!	#REF!
---------------	--------------	--------------

a. **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 sebesar Rp. 220.596.000,00 Beban Pegawai Bagian Hukum Setda sepenuhnya berupa uang lembur PNS sebesar Rp. 21.546.000,00 dan Honorarium PNS sebesar Rp. 199.050.000,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 176.954.875,00,- dan Rp. 176.954.875,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut: "

Rincian Beban Persediaan Tahun 2020

Uraian Beban Persediaan	Jumlah
Beban Bahan Pakai Habis	42,321,875.00
<i>Beban Alat Tulis Kantor</i>	40,231,875.00
<i>Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya</i>	1,440,000.00
<i>Beban Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)</i>	650,000.00
Beban Cetak / Penggandaan	80,343,000.00
<i>Beban Cetak</i>	21,442,000.00
<i>Beban Penggandaan</i>	58,776,000.00
<i>Beban Penjilidan</i>	125,000.00
Beban makan dan minum	54,290,000.00
Beban Makanan Dan Minuman Rapat	50,910,000.00
Beban Makanan Dan Minuman lembur	-
Beban Makan dan Minum Jamuan Peserta/Pani	3,380,000.00
Jumlah Beban Persediaan	176,954,875.00

c. **Beban Jasa**

Jumlah Beban Jasa Tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 48.758.000,00 dan Rp. 158.883.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (110.125.000,00) atau sebesar -69.31% dari tahun 2019.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2020

Uraian Beban Jasa	Jumlah
Beban Jasa Kantor	48,758,000.00
<i>Beban Surat Kabar/Majalah</i>	8,590,000.00
<i>Beban Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber</i>	23,500,000.00
<i>Beban Uang saku kegiatan/ rapat</i>	-
<i>Beban Jasa PHL/ Penjaga malam/ Petugas Kebersihan</i>	-
<i>Beban Jasa service dan Penggantian komponen</i>	14,970,000.00
<i>Beban Jasa Pelayanan umum</i>	1,698,000.00
<i>Beban Jasa/ Pengadaan/ Pemeliharaan/ Penyesuaian</i>	-
<i>Beban Jasa Pihak Ketiga</i>	-
Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	-
<i>Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat</i>	-
<i>Beban sewa Penginapan dan Akomodasi</i>	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-
<i>Beban sewa alat Elektronik</i>	-
Jumlah Beban Jasa	48,758,000.00

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 34.513.067,00 dan Rp. 31.109.066,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.404.001,00 atau sebesar 10.94% dari tahun 2019.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	34,513,067.00
<i>Beban Jasa Service</i>	1,975,000.00
<i>Beban Penggantian Suku Cadang</i>	15,177,000.00
<i>Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas</i>	17,361,067.00

e. Beban Perjalanan Dinas

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 285,403,130.00 dan Rp. 588,793,072.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. -303,389,942.00 atau sebesar -51.53% dari tahun 2019.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun2020

Uraian	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas	285,403,130.00
<i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	4,640,000.00
<i>Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>	280,763,130.00

f. Beban Bunga

Nihil

g. Beban Subsidi

Nihil

h. Beban Hibah

Nihil

i. Beban Bantuan Sosial

Nihil

j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan tahun 2019 sebesar Rp. 47.969.102,00 dan Rp. 60.200.431,00 mengalami penurunan sebesar Rp.(12.231.329,00) atau sebesar

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun2020

Uraian	Jumlah
<i>Beban penyusutan peralatan dan mesin</i>	47,969,102.00
<i>Beban penyusutan gedung dan bangunan</i>	#REF!
<i>Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan</i>	#REF!
<i>Beban Penyusutan Aset Lainnya</i>	-

Jumlah Beban Penyusutan	#REF!
--------------------------------	--------------

k. Beban Transfer

Nihil

l. Beban Lain-lain.

Nihil

3.4.3. Kegiatan Non Opeasional

Pada tahun anggaran 2020 Bagian Hukum tidak terdapat surplus/ (defisit) Non Operasional.

3.4.4. Pos Luar Biasa

1. Pendapatan Luar biasa

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun 2019 tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa

2. Beban Luar biasa

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun 2019 tidak terdapat Beban Luar Biasa

3.3.4. Surplus/ (Defisit) LO

Realisasi Defisit -LO Bagian Hukum Setda tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.466.483.344,00 Apabila dibandingkan dengan Realisasi Defisit - LO tahun 2019 sebesar Rp. 1.621.672.161,00 Maka terdapat penurunan sebesar Rp. 155.188.817,00 atau 9,57 %.

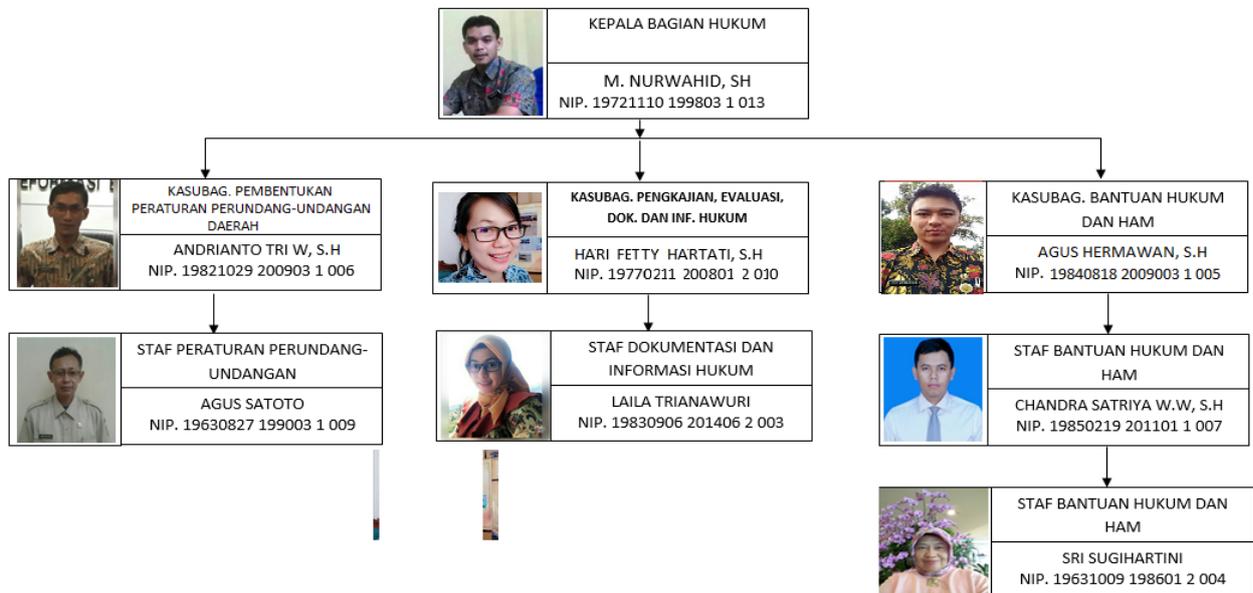
3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Bagian Hukum Setda tahun anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas selama tahun anggaran 2019.

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 201.567.827,00 berasal dari Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp253.462.158,00 ditambah Defisit-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 814.194.174,00 ditambah kewajiban yang dikonsolidasikan Rp. 814.194.174,00 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar Rp. (3.905.729,00)"

**BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM KABUPATEN WONOSOBO



BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Bagian Hukum Setda merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2020 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Bagian Hukum Setda dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2020.

Wonosobo, 28 Februari 2021
Kepala Bagian Hukum Setda

M.NURWAHID, SH
NIP. 19721110 199803 1 013

LAMPIRAN

